



Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Pengelolaan Kelautan dalam Mendukung Pelaksanaan Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan

Disampaikan pada Audiensi dengan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara

A. Koswara

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Tanggal

11 Februari 2026

A vibrant underwater scene featuring a diverse coral reef. The water is a deep, clear blue, and sunlight filters down from the surface, creating a dappled light effect. Numerous colorful fish, including yellow tangs, orange and white striped clownfish, and small blue fish, are swimming throughout the scene. The coral is varied in shape and color, with some appearing as soft, feathery structures and others as more solid, branching forms in shades of orange, pink, and green.

1

Organisasi DJPK



Struktur Organisasi DJPK

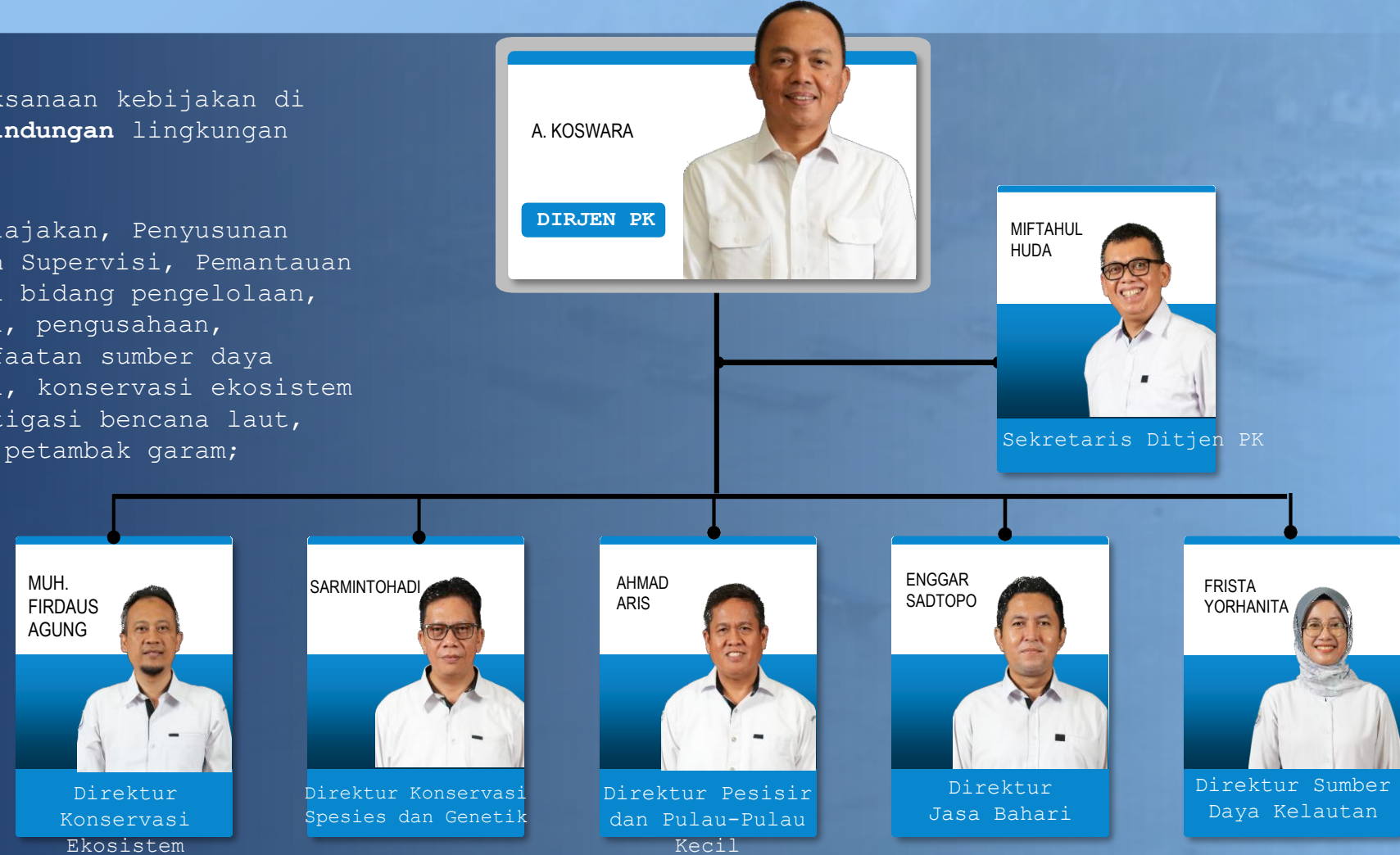
(PERMENKP NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KKP)

TUGAS

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **pengelolaan** kelautan dan **pelindungan** lingkungan laut.

FUNGSI

Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan NSPK, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi, Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;



4 UPT LINGKUP DJPK



UPT LINGKUP DJPK

(PERMENKP NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN)

No.	Nama	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
1.	Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	-
		a. Provinsi Kalimantan Selatan b. Provinsi Kalimantan Tengah	Banjarmasin
		a. Provinsi Kalimantan Timur b. Provinsi Kalimantan Utara c. Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu	Balikpapan
		a. Provinsi Banten b. Provinsi Daerah Khusus Jakarta c. Provinsi Jawa Barat d. Provinsi Jawa Tengah e. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Jakarta
2.	Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	Provinsi Bali	-
		Provinsi Jawa Timur	Surabaya
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
		a. Provinsi Sulawesi Barat b. Provinsi Sulawesi Selatan c. Provinsi Sulawesi Tenggara d. Provinsi Sulawesi Tengah e. Provinsi Sulawesi Utara f. Provinsi Gorontalo g. Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi	Manado
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Lombok Utara
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya	Pangkajene dan Kepulauan
3.	Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
		a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara c. Provinsi Papua Barat Daya d. Provinsi Papua Barat e. Provinsi Papua f. Provinsi Papua Tengah g. Provinsi Papua Selatan	Sorong
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian	Dobo

No.	Nama	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
		Tenggara dan Laut di Sekitarnya	
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda	Banda
		a. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya b. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya	Raja Ampat
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya	Biak
4.	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Kepulauan Riau d. Provinsi Riau	-
		a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Jambi c. Provinsi Sumatera Selatan d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Padang
		a. Provinsi Bengkulu b. Provinsi Lampung c. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pih dan Laut di Sekitarnya d. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut di Sekitarnya	Padang Pariaman

A vibrant underwater scene featuring a diverse coral reef. The water is a deep, clear blue, and sunlight filters down from the surface, creating a dappled light effect. Numerous colorful fish, including yellow tangs, orange and white striped tangs, and smaller blue and yellow fish, are swimming throughout the scene. The coral is varied in shape and color, with some appearing as branching structures and others as more rounded, brain-like formations in shades of brown, orange, and purple.

2

Peran DJPK dalam Mendukung Kebijakan Ekonomi Biru

Asta Cita Presiden & Wakil Presiden RI

Visi Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

8 Misi Asta Cita sebagai Agenda Prioritas Nasional

1



Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2



Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan**, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan **ekonomi biru**

3



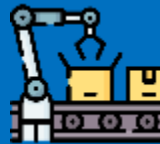
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

4



Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

5



Melanjutkan **hilirisasi** dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6



Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

7



Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

8



Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan **lingkungan**, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sasaran Pembangunan



8%

Pertumbuhan Ekonomi



0%

Tingkat Kemiskinan



Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 - 2029

KKP mendukung Misi Asta Cita ke-2 hingga ke-8, terutama Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8

Fungsi KKP dan Kebijakan Ekonomi Biru dalam Mendukung **Asta Cita Presiden**

5 KEBIJAKAN EKONOMI BIRU KKP

Fungsi Utama KKP

Fungsi
Perencanaan &
Kontrol

SETJEN

Mengoordinasikan perencanaan, administrasi, dan pengelolaan internal KKP

ITJEN

Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan KKP

Fungsi
Pengendalian &
Pemanfaatan

DJPRL

Merencanakan dan mengatur pemanfaatan ruang laut

DJPK

Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan

DJPT

Mengelola sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan

DJPB

Meningkatkan produktivitas perikanan budi daya secara berkelanjutan

Fungsi
Pendukung
Teknis

DJPDSPKP

Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk hasil KP

BPPMHKP

Menjamin mutu dan keamanan produk hasil KP

BPPSDMKP

Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sektor KP

DJPSPDKP

Mengawasi dan mengendalikan pelanggaran pemanfaatan sumber daya KP

Kebijakan Ekonomi Biru menjadi prinsip utama KKP dalam menjalankan fungsi untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan

Kebijakan Ekonomi Biru untuk Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Melindungi Laut dan Sumberdayanya

1

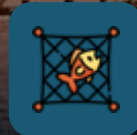
Memperluas Kawasan Konservasi Laut



Mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan

2

Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota



3

Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan



Menjaga kelestarian wilayah laut

4

Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



5

Pembersihan Sampah Plastik di Laut



Memperluas Perlindungan, Mengurangi Tekanan/dampak Negatif Kegiatan Manusia, Melestarikan dan Menjaga Kualitas Ekosistem Laut dan Layanan Ekosistemnya

Kondisi Eksisting



Jumlah luas kawasan konservasi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 29,27 juta hektar, atau setara dengan 9% dari luas laut Indonesia

Instrumen Regulasi

- o UU No. 31/2004 tentang Perikanan
- o UU No. 32/2014 tentang Kelautan
- o PP No. 60/2007 tentang Tata Cara Konservasi Sumber Daya Ikan
- o PP No. 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
- o PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- o Permen KP No. 31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Strategi

- o Perluasan kawasan konservasi laut
- o *Marine Protected Area* dimasukkan ke dalam peta IMO
- o Penguatan sistem pengawasan dan monitoring berbasis satelit di kawasan konservasi
- o Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan aturan
- o Membentuk model *Coral Bond*
- o Menyusun *Ocean Accounting*
- o Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan
- o Memperkuat sumber daya manusia

Target



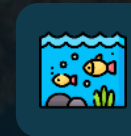
Memperluas kawasan konservasi laut menjadi 97,5 juta hektar (30% dari luas laut) pada tahun 2045



Meningkatkan penyerapan karbon sebesar 188 juta tCO₂eq



Meningkatkan produksi oksigen



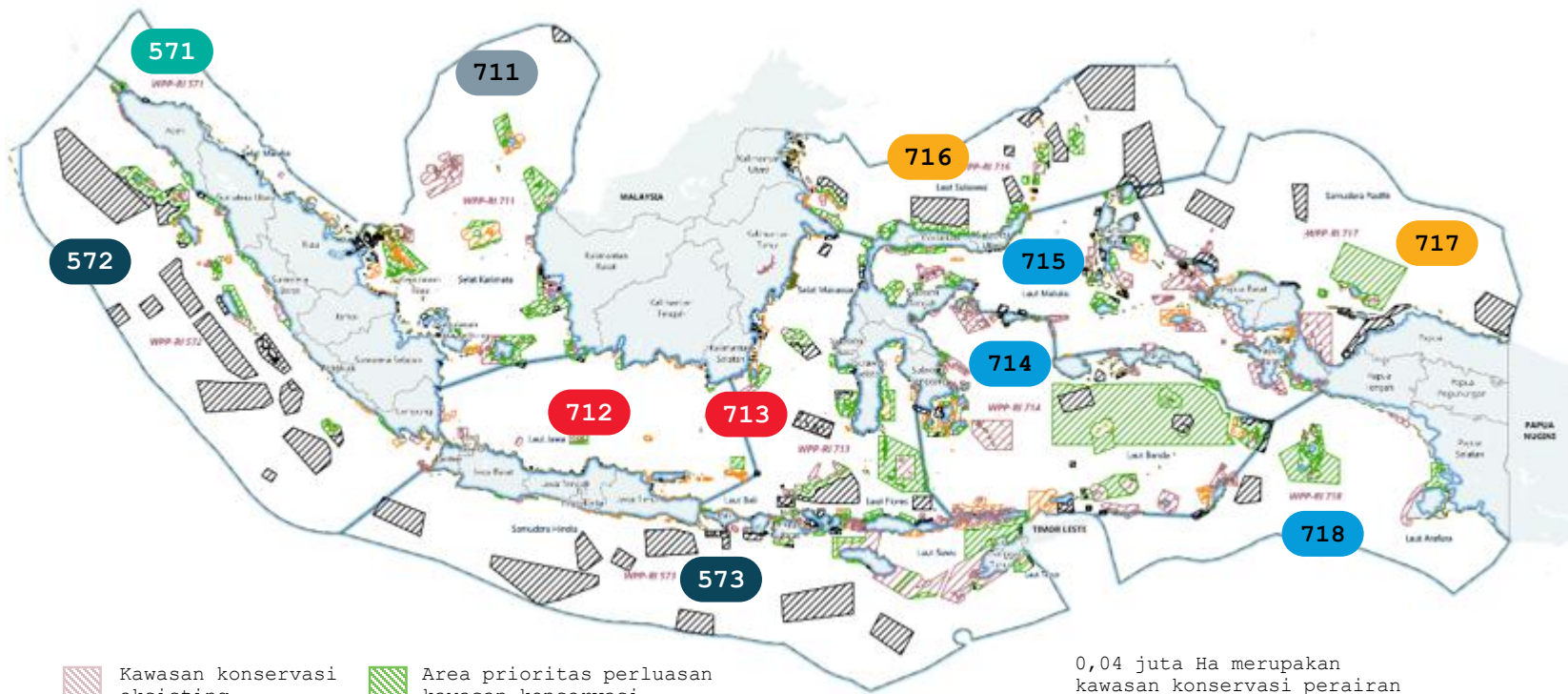
Melestarikan *spawning ground*, *nursery ground*, dan *feeding ground* untuk menjaga keberlanjutan stok ikan bernilai ekonomi tinggi

Perluasan Kawasan Konservasi Laut



Luasan kawasan konservasi laut Indonesia mencapai **29,27 juta Ha** pada tahun 2023 dari target **97,5 juta Ha** pada tahun 2045

Peta Kawasan Konservasi



Kawasan konservasi eksisting

Area prioritas perluasan kawasan konservasi

Kawasan konservasi pencadangan

Area prioritas pengembangan kawasan konservasi baru

0,04 juta Ha merupakan kawasan konservasi perairan darat

Zona 1

WPP 711

2023

4,68

juta Ha

2045

9,9

juta Ha

Zona 2

WPP 716, 717

2023

2,89

juta Ha

2045

16,8

juta Ha

Zona 3

WPP 714, 715, 718

2023

12,49

juta Ha

2045

32,2

juta Ha

Zona 4

WPP 572, 573

2023

5,66

juta Ha

2045

23,8

juta Ha

Zona 5

WPP 571

2023

0,09

juta Ha

2045

1,4

juta Ha

Zona 6

WPP 712, 713

2023

3,42

juta Ha

2045

13,4

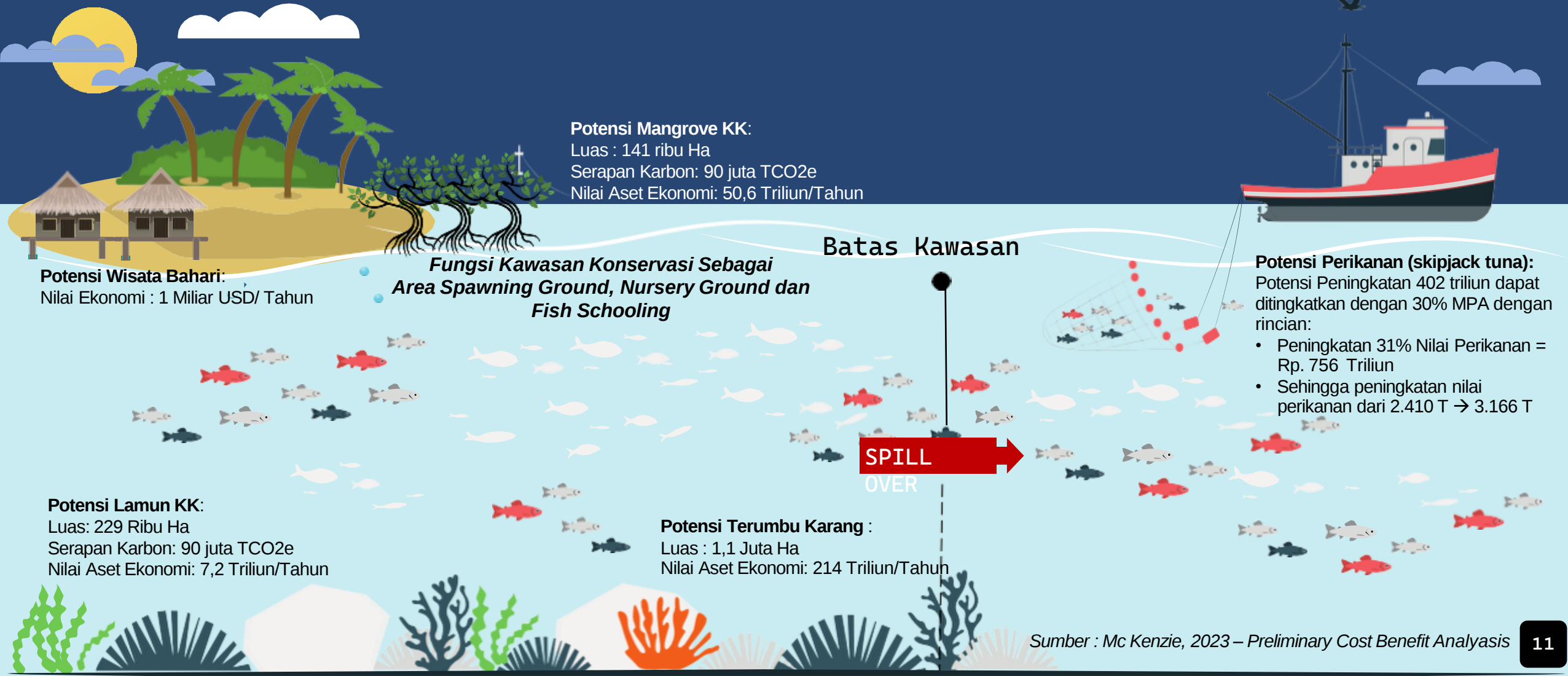
juta Ha



Fungsi dan Manfaat Kawasan Konservasi

Luasan Kawasan Konservasi di Indonesia sampai tahun 2024: 29,9 Juta Ha

Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan produksi oksigen, menjaga keberlanjutan stok ikan, melindungi ekosistem penting perairan dan stok karbon.



STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



Pengelolaan Konservasi Jenis

Tujuan

Kondisi Eksisting

Gap Pengelolaan

Kondisi yang Diharapkan

Biota Perairan Appendiks Cites

- 1** Pemenuhan ketentuan konvensi CITES : Legalitas, Keberlanjutan, Ketertelusuran
- 1) KKP saat mengelola taksa IKAN BERSIRIP (pisces)
 - 2) Ijin pemanfaatan : telah diterbitkan 1.039 SIPJI (sd 2024) dan dokumen ekspor 6.683/tahun
 - 3) Penetapan kuota penangkapan dan kuota ekspor sejak tahun 2021
 - 4) Estimasi devisa Rp. 6 Triliun/Tahun dan PNBP Rp. 26 Milyar/Tahun
 - 5) Tahun 2025 ada pengalihan pengelolaan biota perairan dari Kemenhut ke KKP

- 1** Tingkat Kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha masih kurang
- 2** Jumlah kuota belum optimum, potensi kehilangan devisa negara Rp. 4 T/tahun dan PNBP 10 M/tahun.
- 3** Jumlah UPT yang tersedia belum memadai untuk melakukan fungsi pelayanan (6 UPT melayani 28 provinsi)

- 1** Ekspor Indonesia diterima di negara tujuan
- 2** Kelestarian sumber daya terjaga
- 3** Devisa, PNBP, pendapatan Masyarakat meningkat

Biota Perairan dilindungi

- 1** Menurunkan resiko kepunahan biota perairan dilindungi melalui Upaya: Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan
- 1) 43 spesies jenis ikan telah ditetapkan status perlindungannya
 - 2) Rencana Aksi Nasional (RAN) konservasi jenis ikan dilindungi
 - 3) Rehabilitasi populasi dan habitat telah dilakukan di beberapa lokasi
 - 4) Pengendalian pemanfaatan melalui kewajiban perizinan, kuota dan dokumen angkut

- 1** 309 spesies terancam punah belum ditetapkan status perlindungannya
- 2** Belum ada mandat regulasi untuk melakukan pengendalian jenis asing invasive (TUSI BARU)
- 3** TUSI baru untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) biota perairan

- 1** Tingkat ancaman kepunahan biota perairan menurun
- 2** Populasi terjaga kelestariannya
- 3** Pemanfaatan terkendali

Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Potensi



Luas perairan 6,4 juta km², 17.504 pulau, dan garis pantai sepanjang 108.000 km

Instrumen Regulasi

- o UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- o UU No. 32/2014 tentang Kelautan
- o PP No. 62/2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar
- o PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- o PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
- o Perpres No. 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
- o Perpres No. 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
- o Permen KP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- o Permen KP No. 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
- o Permen KP No. 10/2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Strategi

- o Peningkatan produksi dan kualitas garam di wilayah-wilayah pesisir
- o Pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil harus sesuai mitigasi dampak
- o Semua pemanfaatan ruang laut wajib memiliki PKKPR
- o Pengelolaan hasil sedimentasi di laut
- o Mitigasi perubahan iklim
- o Penguatan pengawasan sumber daya kelautan berbasis satelit
- o Penguatan ekonomi masyarakat pesisir berkelanjutan
- o Penguatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pesisir
- o Pengembangan wisata berbasis ekologi
- o Membangun neraca sumber daya dan sistem *One Map Policy*
- o Pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan

Target



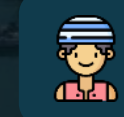
Membangun ekonomi ramah lingkungan



Memperbaiki dan melindungi ekosistem pulau-pulau kecil



Mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut dan pesisir

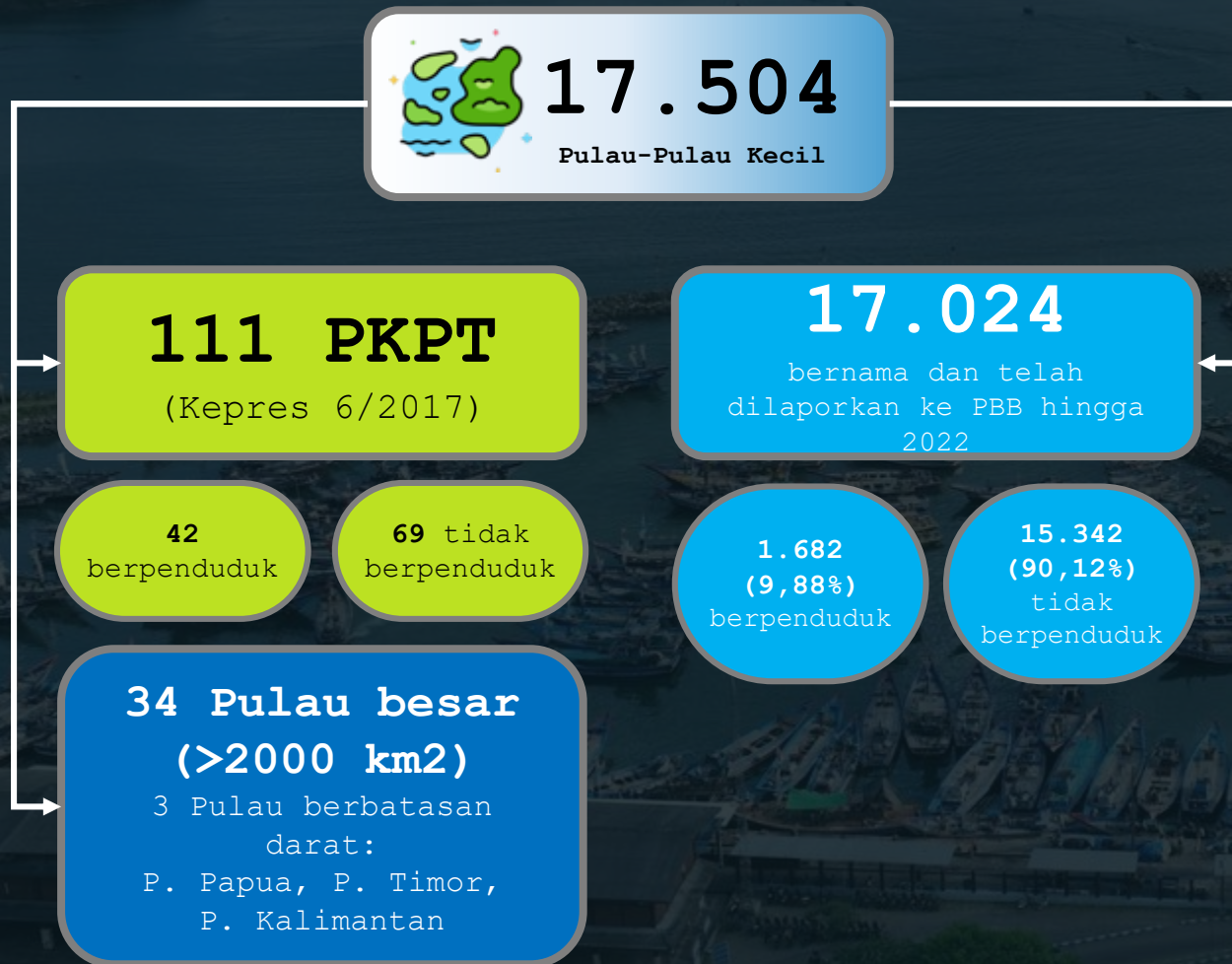


Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir



Menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL



Kendala



Aksesibilitas transportasi dan komunikasi rendah



Keterbatasan sarana dan prasarana



Kemiskinan Masyarakat dan kualitas SDM



Degradasi lingkungan dan sumberdaya



Daya dukung terbatas dan rentan rusak



Biaya tinggi dan alokasi anggaran rendah



Pengawasan dan penegakan hukum



Intervensi Mitigasi Perubahan Iklim di Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil



Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

- Bina Manusia
- Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
- Bina Kelembagaan



Pembangunan Struktur

- Struktur Pelindung Pantai
- *Sediment trap* dan mengurangi abrasi
- Dimanfaatkan untuk tujuan rehabilitasi/konservasi



Memperluas Kawasan Konservasi



Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

- Penyadartahuan bagi siswa SMP/SMU
- Menumbuhkan semangat jiwa Bahari
- Siswa sebagai Agen Perubahan



Rehabilitasi Mangrove

- Pembibitan Mangrove
- Penanaman Mangrove
- Pengembangan Edu dan ekowisata
- Pemberdayaan Masyarakat



Pengelolaan Data dan Informasi

- Ocean Accounting
- APP Laut



Penyadartahuan Masyarakat MBAPI (Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim)



Penanaman Vegetasi Pantai

Kondisi Eksisting



50.062.054 Ton timbunan sampah (60% terkelola, 40% tidak terkelola)



16.019.856 Ton sampah masuk ke laut (80% sampah dari darat, 20% sampah kegiatan laut)

Sumber SIPSN, KLH 2025

Instrumen Regulasi

- o UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- o UU No. 32/2014 tentang Kelautan
- o Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Plastik di Laut
- o Kepmen KP No. 130/2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan
- o Rancangan Perpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah

Strategi

Pembersihan sampah plastik di laut melalui penguatan kolaborasi hulu-hilir antar *stakeholder* pengelolaan sampah



Penilaian neraca sampah berbasis kawasan pantau



Pemberian insentif dan disinsentif terhadap stakeholder



Perubahan budaya masyarakat pada aktivitas menghasilkan sampah



Integrasi sumber pendanaan untuk pengelolaan sampah laut

Target



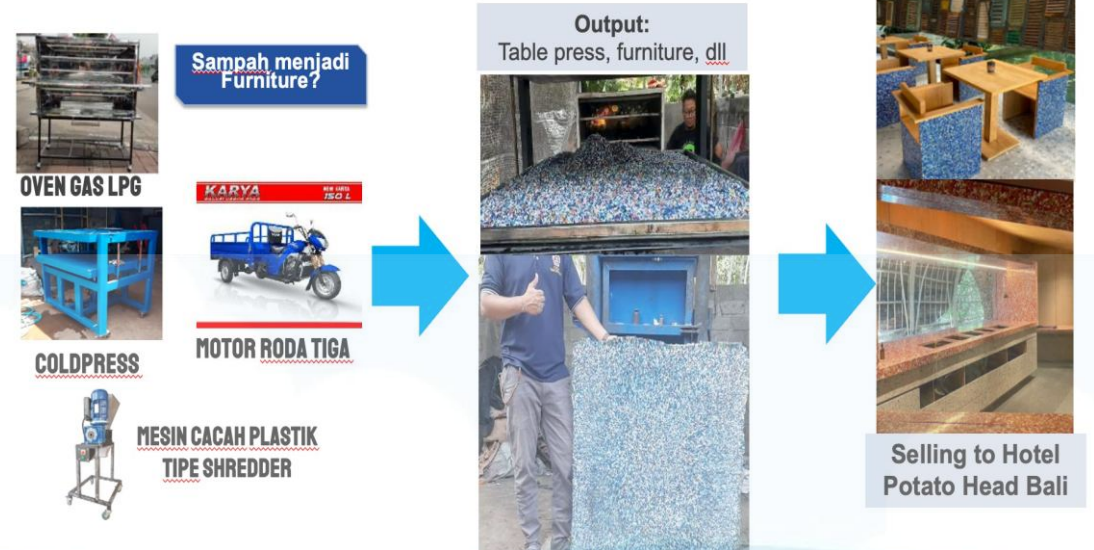
Pengurangan 50% sampah masuk ke laut pada 2029

Target



INOVASI PENANGANAN SAMPAH PLASTIK

Upaya KKP dalam Penanganan Sampah Plastik



KKP bersama BSI dan Plasticpay kurangi sampah plastik

© Minggu, 30 April 2023 15:05 WIB



Inovasi Penanganan Sampah Plastik



Indikator Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2026

Goals	Kebijakan	Objectives	No	Control & Check Points	Baseline 2024	Target	
						2025	2026
Melindungi Laut dan Sumber Dayanya	Memperluas Kawasan Konservasi Laut ★ Program : Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI)	Meningkatkan luas kawasan konservasi dan OECM (KBK)	1	Luasan Kawasan (Ha) Konservasi dan Kawasan berdampak konservasi	29,9	30	30,7
		Menurunkan resiko kepunahan biota perairan yang dilindungi	2	Pengelolaan Biota perairan yang dilindungi (spesies)	baru	420	445
		Monetisasi Nilai ekonomi Jasa Lingkungan Konservasi dan pengelolaan Konservasi berkelanjutan	3	Jumlah Kawasan dengan Blue Carbon Credit yang tersertifikasi (kumulatif)		-	4
			4	Nilai Investasi pada Pulau dan Laut di Kawasan Konservasi (akumulatif) (Miliar)		-	250
Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru, pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK ★ Program : Pulau dan Laut untuk Ekonomi Kuat (PELAUT)	Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Produksi Garam Nasional (Swasembada Garam)	5	Nilai Tukar Petambak Garam	129,62	130	130,25
			6	Volume Produksi Garam (juta ton)	2,04	2,25	2,5
		Meningkatkan Ekonomi dari Jasa Bahari dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	7	Nilai Transaksi Blue Carbon (Miliar)*	baru	-	-
			8	Nilai Investasi pada Hilirisasi Jasa dan Sumber Daya Kelautan (Miliar)		1.800	4.700
		Meningkatkan Ekonomi & Sosial di PPK tertinggal	9	Peningkatan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK)	0,40	0,49	0,50
		Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan P3K	10	Panjang Pesisir direhabilitasi (akumulatif) (Km)	baru	-	10
			11	Jumlah PPK yang diinvestasi dan direhabilitasi (akumulatif) (pulau)		-	1
Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pembersihan Sampah di Laut ★ Program : Laut - Sehat Bebas Sampah (SEBASAH)	Terjaganya Kesehatan dan Biota Laut	12	Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut (akumulatif) (persentase)	baru	1%	8%

A vibrant underwater scene featuring a diverse coral reef. The water is a deep, clear blue, and sunlight filters down from the surface, creating a dappled light effect. Numerous colorful fish, including yellow tangs, blue tangs, and orange and white striped clownfish, are swimming throughout the scene. The coral is varied in shape and color, with some appearing as soft, feathery structures and others as more solid, branching forms. The overall atmosphere is serene and lively.

2

Program Strategis DJPK

Program Strategis: Program Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI)

**PENANGGUNG
JAWAB :**

**DITJEN PENGELOLAAN
KELAUTAN**

**LOKASI /
OBYEK:**

- Restorasi Pantura Jawa di 4 lokasi
- Revitalisasi pesisir di 100 kawasan
- Pengelolaan Efektif Konservasi 112 kawasan Konservasi + 50 Lokasi Kawasan Perluasan
- Pengelolaan 446 biota perairan terancam punah, dilindungi, dan/atau appendiks CITES

TUJUAN

- Mengembalikan fungsi ekologi pesisir dan laut melalui rehabilitasi 3.162 ha ekosistem mangrove, revitalisasi pesisir di 2 lokasi dan pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem di 4 lokasi di Kab. Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu di tahun 2026
- Meningkatkan ketahanan pesisir melalui upaya pengurangan risiko bencana, pengendalian perubahan iklim, dan restorasi ekosistem di 100 kawasan
- Melestarikan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan efektif 113 kawasan konservasi, perlindungan kawasan pemijahan ikan, dan 446 biota perairan terancam punah, dilindungi, dan/atau appendiks CITES

DAMPAK

Nilai Manfaat Lingkungan



Potensi Serapan Karbon

1,5 miliar
ton/ CO₂eq

Nilai

736,3 Miliar



Terlindunginya ekosistem pemijahan ikan seluas 758 ribu ha



Terjaganya populasi biota ikan terancam punah (penyu, mamalia, endemik)



Pemanfaatan jasa lingkungan dan nilai ekonomi karbon

Jumlah Manfaat Ekonomi

Estimasi Devisa *

Rp 9,8 T/tahun

PNBP

Rp 29,5 M/tahun

Nilai ekonomi karbon

Rp 736 M

Nilai Kawasan Pesisir

Rp 504 M

Terlindungi

Nilai Ekowisata mangrove

Rp 1 M /Tahun

Nilai Manfaat Sosial



Jumlah Tenaga Kerja

51.500 orang

Total Pendapatan

7.94 Triliun

INTERVENSI



Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Pantura Jawa

Rehabilitasi ekosistem pesisir

Pembersihan dan penempatan sedimen untuk rehabilitasi

Pembangunan Sarpras Ekowisata Mangrove

Pengelolaan Ekosistem Karbon dan Penyusunan Neraca SDL



Revitalisasi pesisir untuk ketahanan ekonomi dan lingkungan

Restorasi ekosistem pesisir

Pembangunan sarpras revitalisasi pesisir



Konservasi Ekosistem untuk Ekonomi Biru

Perluasan kawasan konservasi

Pengelolaan efektif kawasan konservasi



Konservasi Biota Perairan untuk Ekonomi Lestari

Perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik

Pengendalian pemanfaatan, perizinan dan pemenuhan ketentuan konvensi

Program Strategis: Pulau dan Laut Sehat untuk Ekonomi Kuat (PELAUT)

TUJUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan 17 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) berbasis jasa ekosistem laut berkelanjutan



Restoran



Vila



Akses Jalan



Terumbu Karang



Dermaga



Karbon



Seaplane



Solar Panel



Wisata Air



Dermaga Seaplane



Mangrove



Dive Operator

INTERVENSI



Survei Pemetaan dan Tata Kelola data P3K



Penyusunan prospektus dan perencanaan pembangunan P3K



Bantuan sarana dan prasarana P3K



Rehabilitasi dan perlindungan pesisir di luar kawasan



Hilirisasi Sumber Daya Kelautan



Pemanfaatan jasa bahari



Perizinan, pengendalian dan kemitraan P3K

DAMPAK

Pendapatan PNB

450 Milyar

Nilai Investasi

23.000 Milyar

Penyerapan Tenaga Kerja

5.000 Orang

Diversifikasi Usaha

20 Jenis Usaha

(penyediaan akomodasi, pemandu wisata, dive operator, validator/verifikator karbon biru, kuliner, jasa kapal wisata, videographer, fishing charter, wellness tourism)

INDIKATOR INVESTASI



NPV_(Equity)

Rp 12,89 M



IRR_(Equity)

31%

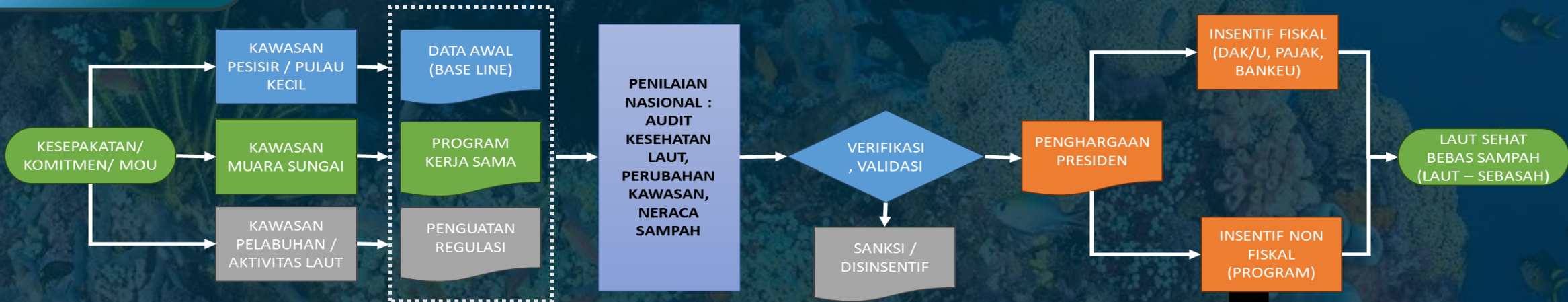


Payback Period

3 Tahun 1 bulan

Program Strategis: LAUT SEBASA (Laut Sehat Bebas Sampah)

Proses Bisnis



CARA SAMPAH MASUK KE LAUT



EUTROFIKASI : KONDISI ALGA BERLEBIH



MICROPLASTIK



PLASTIK YANG MASUK KE LAUT AKAN TERBURAI MENJADI MICROPLASTIK DI LAUTAN

SAMPAH MERUSAK EKOSISTEM



SAMPAH YANG MENEMPEL EKOSISTEM PESISIR MENGHAMBAT PENYERAPAN NUTRISI & OKSIGEN

BI MIKROPLASTIK DIKOSUMSI BIOTA LAUT



MIKROPLASTIK DALAM TUBUH BIOTA LAUT TIDAK DAPAT DICERNA DAN MENYEBABKAN KEMATIAN

TERHADAP LAUT

TERHADAP EKOSISTEM

TERHADAP BIOTA LAUT

DAMPAK SAMPAH

Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Perpres 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Tujuan

- 1 Mewujudkan swasembada garam nasional pada tahun 2027
- 2 Meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri dan membangun sektor pergaraman secara berkelanjutan

Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

- 1 Pemberdayaan dan perlindungan Petambak Garam
- 2 Percepatan investasi dalam Usaha Pergaraman

Strategi

- 1 Intensifikasi
- 2 Ekstensifikasi
- 3 Teknologi dengan lahan terbatas

Pemetaan Lokasi untuk Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional



Identifikasi:

Potensi dan kebutuhan

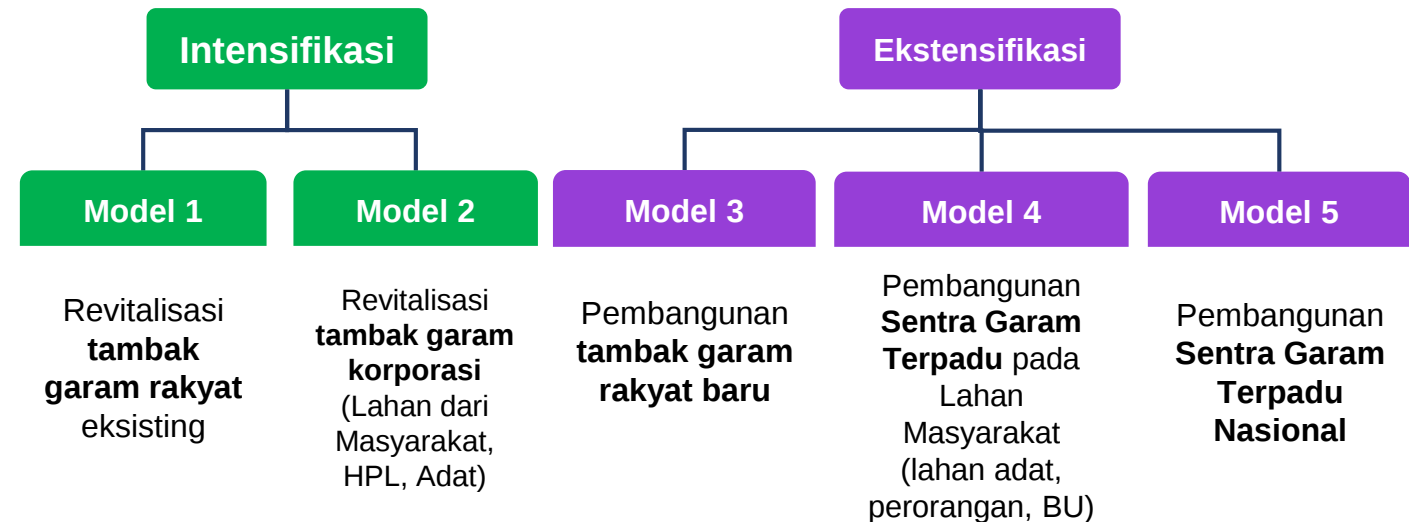
Tantangan

Rencana tindak lanjut

Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Perbaikan Tata Kelola : Produksi, Panen, Pengolahan, Niaga dan Kelembagaan

1. Percepatan proses air tua (*bosem long storage*), perbaikan layout, evaporasi, penerapan SOP tata kelola air, kolam tampung Brine, saluran input dll;
2. Perbaikan meja kristal dg geotekstil dan geomembran;
3. Gudang, sistem monitoring produksi, resi gudang, dll;
4. Akses angkut dari tambak ke gudang dll;
5. Fasilitas *washing plant*, refinery, dll;
6. Kolaborasi stakeholder dari hulu sampai dengan hilir antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
7. Proteksi harga;
8. Standarisasi produk persegmen konsumen;
9. Pemberian insentif dan disinsentif.



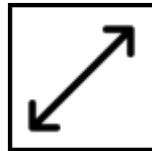
Peran KKP

- Kerjasama pengelolaan gudang dengan KDMP;
- Investasi sarpras produksi, dan revitalisasi tambak kepada KDMP (Kelompok Petambak) sebagai modal produksi yang dikelola KDMP;
- Bantuan infrastruktur pendukung (Kolam Bosem, Jalan produksi, jalan akses, dermaga, dll);
- Perbaikan tatakelola niaga untuk menjamin keberlanjutan program;
- Pemberian insentif dan disinsentif kepada pihak-pihak yang terlibat;
- Penguatan kelembagaan dalam tatakelola seluruh ekosistem industri garam;
- Penguatan proses dan target capaian PNBPN.

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Tambak Garam

1

Intensifikasi



Peningkatan produksi dari sentra produksi eksisting dengan teknologi

Target luas lahan 2025

300 ha

Target Produksi

45.000 ton/tahun

Fokus area

- Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang

Target & Spesifikasi

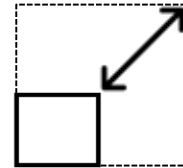
- Peningkatan produktivitas dari 98 ton/ha menjadi 150 ton/ha
- NaCl>97%

Peran KKP (Pemerintah)

- Investasi teknologi
- Penyediaan lahan

2

Ekstensifikasi



Pembukaan lahan dan sentra produksi baru dengan teknologi

1.000 ha

200.000 ton/tahun

Rote Ndao

- Produktivitas 200 ton/ha
- NaCl>97%

- Investasi teknologi
- Penyediaan lahan

Dampak



Terpenuhinya swasembada garam nasional



Peningkatan produktivitas dengan kualitas >**97% NaCl**



Potensi penyerapan tenaga kerja ±**13.000 orang**



Penghematan impor garam sebanyak 2,6 juta ton atau setara US\$ 130 juta pada tahun 2027 (asumsi harga US\$50/ton)



Berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi



Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Terima kasih